

ABSTRAK SKRIPSI

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin pesat yang akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, yaitu: semakin kompleks dan semakin ketatnya persaingan antar badan usaha. Hal ini diawali dari pertemuan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) yang diadakan pada tanggal 15 November 1994 di Bogor yang mencapai kesepakatan jadwal perdagangan dan investasi bebas terbuka pada tahun 2010 bagi negara maju dan pada tahun 2020 bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut harus diantisipasi dengan cermat oleh tiap-tiap badan usaha di Indonesia yang masih ingin meneruskan usahanya, dan badan usaha yang efisienlah yang dapat bertahan dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

Sejak periode deregulasi dan debirokralisasi dilaksanakan, masing-masing BUMN dituntut untuk bertindak lebih efisien, efektif dan dikelola secara profesional serta wajib dan mampu bersaing dengan sehat. Dan menuntut BUMN untuk lebih bertindak bijaksana, penuh perhitungan dan mampu menjalankan tugas dengan baik dengan menata kembali peranannya di masa yang akan datang, dan bekerja lebih efisien dan efektif, serta mampu bertahan dengan berkembangnya sektor swasta yang semakin pesat. Tentu saja BUMN tersebut berusaha untuk meningkatkan pengendalian internalnya, khususnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Pada BUMN/BUMD bagian yang bertugas membantu fungsi pengendalian intern adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang keberadaannya didasari pada PP No.3 tahun 1983. Dalam melaksanakan pemeriksaan, SPI menggunakan pemeriksaan operasional sebagai alat pelaksana fungsi pemeriksaan intern. Dan dari hasil pemeriksaan operasional, SPI menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sehingga pihak manajemen akan dapat mengetahui kondisi operasional badan usaha berikut penyimpangannya, untuk kemudian diambil suatu tindakan koreksi.

Dalam skripsi ini pemeriksaan operasional dilakukan pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang salah satu usahanya bergerak dalam memproduksi gula. Pemeriksaan dilakukan pada ke 3 (tiga) bidang kegiatan usaha pabrik gula yaitu: bidang tanaman, pemeliharaan pabrik dan pengadaan (instalasi). Karena ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang material di BUMN tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan mendalam. Tahap pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi, dan mengungkapkan hal-hal yang tampaknya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Tahap pemeriksaan mendalam bertujuan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan mengembangkan berbagai saran untuk perbaikan.

Dari pemeriksaan tersebut diperoleh temuan pada ke 3 (tiga) bidang kegiatan usaha pabrik gula yaitu: bidang tanaman, pemeliharaan pabrik dan pengadaan (instalasi) dimana pada bidang tanaman ditemukan bahwa secara umum

mutu hasil tebang masih di bawah standar tebang yang telah ditetapkan P3G1, penebangan tidak dilakukan pada masa optimal yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi untuk kategori POLRIN II. Terdapat ketidakseragaman upah tebang dimana upah tebang yang dikelola oleh KUD lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula. Sedangkan pada bidang pemeliharaan pabrik ditemukan kesalahan pembebanan harga akibat kurang teliti dan pengklasifikasian yang kurang tepat, terdapat penyimpangan prosedur pemakaian material dan tidak ditaatinya kebijakan badan usaha yang telah ditetapkan. Dan pada bidang pengadaan (instalasi) ditemukan kesalahan pemberian kode perkiraan pada Bon Barang Keluar (BBK), pengeluaran yang kurang efisien atas penilaian suku cadang yang dapat diperoleh dengan *price list* yang lebih rendah dengan mutu yang terbaik daripada menurut kontrak dan pengadaan barang di atas Rp. 1.000.000,00 yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur tender. Hasil temuan tersebut dapat menimbulkan pemborosan seperti: dana yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna tertanam pada biaya pemeliharaan, penambahan biaya variabel hari giling, harga barang menjadi lebih tinggi, sediaan penggunaan nilai anggaran yang kurang tepat, pengeluaran yang kurang efisien atas beban perusahaan, dan nilai investasi menjadi lebih tinggi 10%.

